

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Desinta Dwi Rapita
Suwarno Winarno**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

The manners education is a strategic education and it is very urgent to be given because it is a form of conscious effort to give the learners to behave as people who have religious faith, having good manner, having good characteristics and good qualities as well as being responsible to his society and his country. More specifically, the manner education conducted in the Class II a Children Jail Blitar (LPA Blitar) is one of the guiding efforts in order to restore children's mental and behavior to the better direction. It is expected that through this education, those children can be complete human beings, put away their dark past, knowing what they have done wrong and never do those mistakes again so that the society can accept them back. This study also aims to describe the problems faced when conducting the Manner Education in LPA Blitar, which covers the purpose of the Manner Education in LPA Blitar, the contents of the Manner Education materials in LPA Blitar, the methods and media being used in the teaching of Manner Education in LPA Blitar, the application of the evaluation of the Manner teaching and learning, the challenges faced during the teaching and learning process as well as the techniques used for overcoming the challenges in teaching Manner Education in LPA Blitar.

Abstrak: Pendidikan Budi Pekerti cukup strategis dan urgen karena digunakan untuk membekali para peserta didik agar menjadi manusia yang ber-imtaq, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Tujuan dari penulisan adalah mendeskripsikan tujuan, materi, metode pelaksanaan pendidikan, evaluasi, hambatan dan upaya mengatasinya hambatan dalam pendidikan budi pekerti di LPA (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Metode menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh dari pegawai dan anak binaan LPA. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti di LPA adalah untuk mengubah perilaku anak binaan yang semula tidak baik menjadi berperilaku baik. Materi meliputi saling menghormati antar sesama, bertanggungjawab dan disiplin, menjalankan ibadah sesuai agamanya, diajarkan mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, sopan santun, patriotis, empati, adil, dan kebersamaan. Mengenai metode yang dilaksanakan dalam pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar ialah metode ceramah, permainan, diskusi dan pembiasaan. Evaluasi dengan cara memberikan test dan evaluasi diri. Hambatan yang dihadapi antara lain: motivasi belajar rendah, kurangnya koordinasi dan pengertian dari masing-masing sub bidang di Lapas, jumlah tenaga pengajar yang terbatas, guru pengajar kurang kompeten, motivasi guru dalam mengajar kurang, dan minimnya jam pelajaran.

Kata Kunci: pendidikan, budi pekerti, lembaga pemasyarakatan anak

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami patologi sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita telah tercabut dari peradaban ketimuran yang terkenal sangat santun, beradab dan sopan. Pada saat ini banyak dari mereka yang bersikap hedonis dan menelan peradaban barat tanpa seleksi yang

matang. Akibatnya muncul efek-efek sosial yang buruk. Berbagai macam masalah sosial dan masalah moral bermunculan. Tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Pencurian, penganiayaan, sampai pembunuhan adalah sedikit dari tindak kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Hasilnya banyak

generasi muda kita yang akhirnya menghabiskan masa anak-anak dan masa mudanya di Lembaga Pemasarakat.

Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Segala bentuk usaha telah dilakukan untuk mengembalikan generasi muda kita kepada jalurnya, yaitu generasi muda yang penuh semangat, mempunyai adab yang baik, berbudi pekerti, sopan santun dan saling menghormati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan, terutama pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini diberikan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral (Indrayanto, 2009:1).

Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Rochmadi (2002:28) menjelaskan bahwa dalam suatu proses kependidikan yang diinginkan terdapat suatu poses yang terarah dan bertujuan pada seluruh proses psikologi manusia, yakni penalaran, nilai dan sikap, keterampilan dan kepribadian serta kreativitas. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan harus mampu mengeksplorasi potensi diri dan mengarahkan kemampuan yang dimiliki menjadi suatu kegiatan hidup yang saling berhubungan.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Sesuai dengan isi pasal tersebut maka semua warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan, begitu juga dengan anak-anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan. Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman

RI tentang Organisasi dan Tata Kerja LPA, fungsi LPA adalah untuk melakukan pembinaan anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melaksanakan bimbingan sosial kerohanian, dan melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasarakatan (Muspita, 2006:22).

Lembaga Pemasarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain: (1) sebagai salah satu alat pembentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam kerangka besar negara dan bangsa, yaitu "*nation and character building*", (2) tempat untuk menyadarkan kepada pelanggar hukum agar menyadari perbuatannya yang lalu dan menjadi warga yang taat hukum kembali, (3) sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan, (4) tempat untuk membina dan mendidik narapidana anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan kegotong royongan (Zainab, 2000:11). Diantara empat fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak yang telah disebutkan di atas salah satunya yaitu untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Mereka yang berstatus sebagai narapidana ataupun anak negara tetap berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan budi pekerti.

Istilah budi pekerti secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai yang menentukan ukuran kebaikan dan keburukan perilaku manusia melalui norma agama, norma hukum, tata krama, sopan-santun, dan norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Budi pekerti terlihat dalam bentuk perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik. Sementara itu pendidikan sering kali diartikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk membantu anak dalam menyiapkan kehidupannya di masa depan (Sutja, 2007:2).

Pendidikan Budi Pekerti diartikan juga sebagai salah satu dimensi substansi pendidikan nasional sangat penting dan belum sepenuhnya memberikan dampak pembelajaran yang menggembirakan. Oleh karena itulah, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan budi pekerti (Prantiasih, 2010:2).

Zuriah (2007:20) mengemukakan pengertian pendidikan budi pekerti dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Secara konsepsional pengertian pendidikan budi pekerti mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan yang akan datang, (b) upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi dan seimbang (lahir, batin, material, spiritual, dan individu sosial), (c) upaya pendidik untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengakaran, dan latihan serta keteladanan.

Sedangkan secara operasional pendidikan budi pekerti diartikan sebagai upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk.

Setelah beberapa dekade tidak tercantum dalam kurikulum pendidikan, akhirnya pendidikan budi pekerti dirasakan kembali urgensinya untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Usaha memasukkan pendidikan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan diawali dengan rintisan pengintegrasian nilai-nilai budi pekerti dalam seluruh mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran Agama, PPKn, Bahasa Indonesia serta dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Konseling (Dirjen DIKDASMEN, Depdiknas 2004).

Mengikuti perkembangan, maka pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan di LPA Blitar terintegrasi ke dalam mata pelajaran PKn dan Agama. Selain terintegrasi dalam kedua mata pelajaran tersebut, materi pendidikan budi pekerti di LPA Blitar terdapat juga dalam penerapan kehidupan sehari-hari warga LPA atau diterapkan dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai melalui pembiasaan.

Pendidikan Budi Pekerti memiliki tujuan, antara lain: (a) mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius, (b) menanamkan jiwa kepemimpinan dan

bertanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa, (c) memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang negatif, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, baik secara individual maupun sosial, (d) meningkatkan kemampuan untuk menjauhi atau menolak sifat-sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan (Sutja, 2007:3).

Sedangkan Zuriah (2007:176) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan budi pekerti dari perspektif historis adalah untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap hidup, dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, sedang dalam perspektif kekinian, tujuan pendidikan budi pekerti diberikan disekolah-sekolah tidak lain untuk membekali para peserta didik agar mampu berperilaku sebagai manusia-manusia yang berimtaq, berbudi pekerti luhur, berkepribadian dan berkualitas, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya.

Apabila pendidikan budi pekerti ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang notabene merupakan tempat anak-anak yang mengalami penurunan moral, maka akan menjadi sesuatu yang urgen. Untuk mengembalikan moral baik mereka maka Pendidikan Budi Pekerti penting untuk dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pendidikan budi pekerti untuk membentuk mental, moral, spritual, personal, dan sosial peserta didik, maka dalam penerapan pendidikan budi pekerti dapat digunakan berbagai pendekatan dengan memilih pendekatan terbaik dan saling mengaitkan satu sama lain agar menimbulkan hasil yang optimal (Sutja, 2007:4).

Selain pendekatan yang disebutkan di atas, ada pendekatan yang juga digunakan dalam Pendidikan Budi Pekerti, yaitu pendekatan *inculcation*. Arbaiyah Prantiasih (2010:11) mengemukakan bahwa pendekatan *inculcation* adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Pendekatan *inculcation* atau penanaman nilai melalui pembiasaan disadari atau tidak disadari pendekatan ini telah digunakan secara meluas dalam berbagai masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya.

Pendekatan *Incultation* merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan budi pekerti karena: (1) tujuan pendidikan budi pekerti adalah penanaman nilai-

nilai dari siswa. Pembelajaran bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia, (2) menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pandangan hidup Pancasila, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Dalam mengembangkan Budi Pekerti, siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebaik-baiknya, (3) menurut konsep Pancasila, hakekat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial dan makhluk individu. Sehubungan dengan hakekat itu, manusia memiliki hak dan kewajiban dasar yang melekat eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban asasi tersebut juga dihargai secara berimbang. Dalam rangka Pendidikan Budi Pekerti, siswa juga perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajiban dasarnya sebagai manusia, (4) dalam pembelajaran budi pekerti di sekolah, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting. Oleh sebab itu nilai-nilai harus diajarkan kepada siswa sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dalam pembelajaran budi pekerti faktor isi dan nilai dan proses sangat penting (Prantiasih, 2010:11-12).

Pendidikan budi pekerti sangat penting diterapkan khususnya pada anak-anak yang mengalami permasalahan moralitas seperti anak-anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak. Namun, masih banyak hal yang menjadi problematika dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti tersebut. Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini akan membahas lebih lanjut mengenai problematika pendidikan budi pekerti di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar, untuk mengetahui isi materi pendidikan budi pekerti di LPA Blitar, untuk mengetahui metode pelaksanaan pendidikan budi pekerti, untuk menjelaskan pelaksanaan evaluasi pengajaran pendidikan budi pekerti, untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan budi pekerti dan juga untuk mendeskripsikan beberapa cara untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan

menggunakan pendekatan fenomenologis. Peneliti menggambarkan situasi yang sebenarnya di Lembaga Pemasarakatan Anak BLitar. Lokasi penelitian dipilih di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Blitar sendiri, sebab sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran secara umum problematika pendidikan budi pekerti di LPA Blitar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan karena di dalam LPA tersebut peneliti akan mendapat informasi yang cukup untuk mendeskripsikan problematika pendidikan budi pekerti yang menjadi obyek penelitian ini. Selain itu secara jelas peneliti akan mengetahui situasi dan kondisi anak-anak binaan atau narapidana di LPA. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Kehadiran peneliti dalam penelitian problematika pendidikan budi pekerti di LPA Blitar ini sebagai instrument kunci (*key instrument*). Peneliti membuat sendiri seperangkat alat observasi seperti pedoman wawancara dan pedoman penilaian dokumentasi. Sebab, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan kunci seperti Kepala LPA Blitar, Kepala bidang pembinaan, guru pengajar, siswa atau anak binaan LPA Blitar, dan beberapa staf LPA BLitar. Sedangkan observasi dilakukan pada lingkungan LPA Blitar, khususnya kondisi sekolah Istimewa di LPA dan juga suasana pada saat pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti. Selanjutnya untuk dokumentasi ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi yang berarti data yang berupa foto dan juga data yang diperoleh dari dokumentasi berkas-berkas atau sumber buku yang di dapat.

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang digunakan, peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu dengan perpanjangan waktu di lokasi yaitu LPA Blitar dan keajegan pengamatan untuk menghimpun data yang lebih banyak. Selain itu peneliti juga melakukan triangulasi dan pengecekan anggota. Triangulasi dilakukan kepada beberapa informan di luar yang ditentukan, misalnya orangtua anak binaan yang sudah keluar dari LPA. Hal ini dilakukan untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Sedangkan pengecekan anggota dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informan seperti Kepala LPA, Kepala bidang pembinaan, para guru pengajar, dan siswa atau anak binaan LPA untuk

selanjutnya dikumpulkan untuk mengecek kebenaran data dan interprestasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tujuan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar antara lain: *pertama*, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pendidikan budi pekerti agar anak binaan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bisa terlihat dari proses belajar mengajar di kelas mereka diajarkan mengenai konsep-konsep dan contoh budi pekerti yang harus mereka ketahui dan diterapkan dalam kehidupan. *Kedua*, agar mampu berperilaku sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa. Hal ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan anak binaan LPA. Mereka dengan disiplin diajarkan bagaimana cara wudhu, sholat, dan diberikan ceramah-ceramah keagamaan. Selain itu untuk non muslim, mereka disediakan tempat ibadah dan disediakan pembimbing keagamaan di hari-hari tertentu. Keempat, untuk meningkatkan kepekaan mental dan moral terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang negatif. Setelah mengetahui konsep dan contoh sikap-sikap yang baik atau budi pekerti yang luhur, maka tujuan selanjutnya adalah mereka bisa peka terhadap situasi dan kondisi yang sifatnya negatif, misalnya disaat mereka bertemu dengan beberapa orang yang ingin berperilaku jahat kepadanya, maka mereka bisa dengan segera mengindar. Kelima, untuk mengembalikan anak binaan kepada perilaku yang baik dan tidak mengulangi perbuatan tercela yang sebelumnya pernah dilakukan.

Tujuan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar yang disebutkan di atas tentunya sudah sesuai dengan beberapa konsep pendidikan budi pekerti yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Secara operasional pendidikan budi pekerti diartikan sebagai upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa; ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa (Sutja, 2007:2).

Berdasarkan temuan peneliti mengenai tujuan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar jika dihubungkan dengan beberapa konsep tentang pendidikan budi pekerti, maka tujuan utama dari pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar adalah terjadinya perubahan perilaku anak yang semula berperilaku tidak baik menjadi berperilaku baik. Perubahan perilaku yang baik menjadi hal yang penting dan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan budi pekerti. Sehingga dalam hal ini setelah mereka nantinya keluar dari LPA, mereka bisa diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan dapat hidup secara wajar seperti anak-anak pada umumnya.

Mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di LPA Blitar antara lain yaitu mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat, sikap disiplin, patriotis, tenggang rasa, empati, adil dan kebersamaan. Semua materi itu disampaikan melalui kegiatan belajar-mengajar di kelas dan juga melalui kegiatan pembiasaan. Melalui kegiatan belajar-mengajar di kelas, mereka diajarkan norma-norma apa saja yang berlaku dalam masyarakat, konsep disiplin, patriotis, tenggang rasa, empati, adil dan kebersamaan. Mereka juga diberikan contoh-contoh dari sikap-sikap yang dimaksud.

Materi Pendidikan Budi Pekerti yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan bukan tanpa alasan. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki konsep yang hampir sama dengan Pendidikan Budi Pekerti. Pendidikan Kewarganegaraan memberi pengetahuan dan latihan yang membimbing kita dalam memahami hak dan kewajiban, belajar memahami hukum, dan kebenaran dalam hidup berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peserta didik akan memiliki tatakrama dan budi pekerti yang baik (Kusumah, 2002).

Pendidikan Agama mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, yaitu mendidik akhlak yang baik. Di LPA Blitar, anak-anak diajarkan mengenai perbuatan yang baik dan buruk yang berhubungan dengan dosa dan pahala. Mereka diajarkan cara wudhu dan sholat, cara menjalankan ibadah, menghormati sesama, dibiasakan untuk berdoa dahulu sebelum memulai kegiatan, dan berjabat tangan pada saat bertemu dengan guru pengajar. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk karakter manusia yang beriman dan berakhlak.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa isi materi Pendidikan Budi

Pekerti yang diajarkan di LPA Blitar adalah mengenai saling menghormati, bertanggungjawab dan disiplin, menjalankan ibadah, perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, sopan santun, patriotis, empati, adil, dan kebersamaan. Semua isi materi tersebut dimaksudkan untuk membentuk karakter anak yang berakhlak dan dapat mengubah perilaku menjadi baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Nilai-nilai budi pekerti dan tatakrama dapat dibentuk melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran, baik melalui uraian konsep dan prinsip dalam materi yang dikandung, maupun dalam metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan (Kusumah, 2002). Begitu juga pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan di LPA Blitar juga ditanamkan melalui metode atau pendekatan yang berhubungan dengan nilai-nilai budi pekerti. Metode yang digunakan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak di LPA. Misalnya untuk menerapkan atau mengajarkan bagaimana berdisiplin, maka guru tidak hanya menjelaskannya di kelas melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun, guru atau petugas LPA juga mengajarkannya melalui pembiasaan. Misalnya mereka harus mentaati peraturan yang ada dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika tidak, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya pun juga masih dalam batas wajar dan tetap memperhatikan nilai-nilai budi pekerti. Biasanya jika tidak melakukan kegiatan tepat pada waktunya mereka akan diberikan sanksi untuk membersihkan kamar mandi umum atau membersihkan taman.

Agar pendidikan budi pekerti berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yaitu berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam pendidikan budi pekerti menuntut guru melaksanakan evaluasi yang memadukan antara kognitif, afektif dan psikomotorik (Sutja, 2004). Guna memenuhi hal tersebut, maka guru pendidikan budi pekerti dituntut untuk melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai proses dan hasil belajar. Selain test tertulis, untuk mengetahui kompetensi siswa atau peserta didik mengenai pendidikan budi pekerti, maka juga dilaksanakan evaluasi diri.

Seperti pada pelajaran yang lainnya, test tulis dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk materi yang diujikan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Mereka

diminta untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Soal-soal tersebut lebih banyak diberikan dalam bentuk contoh perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Selanjutnya anak binaan diminta untuk mengisi jawaban sesuai dengan pemahaman mereka. Pelaksanaan ujian dilakukan di LPA dengan diawasi oleh tim pengawas dari sekolah lain.

Evaluasi diri dilakukan dengan cara menuliskan laporan mengenai perilaku siswa. Laporan perilaku siswa ini digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar. Selain itu laporan perilaku ini juga dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam hal menentukan keringanan masa tahanan narapidana atau juga bisa dijadikan untuk mempertimbangkan pemberian bebas bersyarat kepada para narapidana.

Pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar masih mengalami hambatan. Hambatan ini berasal dari anak binaan dan juga dari guru atau lingkungan LPA Blitar. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA Blitar sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan antara lain: 1) motivasi belajar siswa rendah, 2) kurangnya koordinasi dan pengertian dari masing-masing sub bidang di Lapas, 3) jumlah tenaga pengajar yang terbatas, 4) guru pengajar kurang berkompeten, 5) kesadaran guru dalam mengajar kurang, dan 6) minimnya jam pelajaran.

Pertama, motivasi belajar siswa yang masih rendah tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang sebenarnya saling berhubungan. Siswa atau anak binaan belum terbiasa dengan kegiatan yang terjadwal seperti yang ada di LPA Blitar sebab memang mereka terbiasa hidup bebas tanpa aturan. Selain itu, lingkungan sekolah yang kurang mendukung juga menjadi salah satu penyebabnya. Lebih sering guru pengajar meninggalkan kelas karena ada instruksi lain dari kepala LPA yang mengharuskan guru meninggalkan kelas. Ini berhubungan dengan hambatan yang kedua, yaitu kurangnya koordinasi antar sub bidang pendidikan dengan sub bidang lainnya. Sehingga siswa juga menjadi enggan untuk pergi ke sekolah.

Ketiga, jumlah pengajar di LPA Blitar terbatas, yaitu mayoritas guru adalah bukan berasal dari tenaga kependidikan dan hanya beberapa guru yang benar-benar bersal dari tenaga

kependidikan yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi hambatan selanjutnya, yaitu dengan jumlah guru yang ada, maka masih banyak yang kurang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kelima, kesadaran guru dalam mengajar kurang. Dari wawancara yang telah dilakukan, terdapat informasi bahwa karena guru pengajar sebagian besar bukan berasal dari tenaga kependidikan dan mereka mempunyai tanggungjawab pokok sebagai petugas masyarakat atau lapas, maka mereka sendiri juga tidak terbiasa dengan tanggungjawab sebagai pengajar. Jadi mereka juga sering meninggalkan tanggungjawab dengan tidak mengajar waktu ada jam pelajaran. Sehingga anak-anak biasanya belajar sendiri dengan tetap berada dalam pengawasan petugas keamanan. Guru yang tidak konsisten dalam mengajar tersebut disebabkan karena adanya kesenjangan sosial. Sebab, dibanding teman-teman guru di sekolah lainnya, gaji yang diperoleh guru LPA Blitar lebih rendah. Hal ini disebabkan SK mereka hanya satu, yaitu sebagai Petugas Lapas, walaupun tugas mereka merangkap sebagai pengajar atau guru.

Keenam, masalah jam pelajaran atau lebih tepatnya jam sekolah yang masih minim. Mereka hanya mendapatkan jam sekolah selama kurang lebih yaitu 2 jam dalam sehari dengan masing-masing mata pelajaran hanya diberikan waktu selama satu jam. Sehingga hal ini masih dirasa sangat kurang untuk memberikan pendidikan budi pekerti kepada anak didik atau anak binaan di LPA Blitar.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah mengenai motivasi belajar siswa rendah, kurangnya koordinasi dan pengertian dari masing-masing sub bidang di Lapas, jumlah tenaga pengajar yang terbatas, guru pengajar kurang berkompeten, kesadaran guru dalam mengajar kurang, dan minimnya jam pelajaran.

Melihat dari hambatan-hambatan yang ada sudah seharusnya diupayakan beberapa hal yang bisa untuk mengatasi hambatan tersebut agar pendidikan budi pekerti bisa dilaksanakan dengan baik di LPA Blitar, mengingat pendidikan budi pekerti ini bersifat urgen dan sangat penting untuk diterapkan khususnya kepada anak-anak yang mengalami permasalahan moral seperti anak-anak binaan LPA Blitar. Beberapa cara yang bisa

dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: a) menyediakan tambahan tenaga guru, b) guru-guru yang masih mempunyai SK dari dephukham diberikan insentif berupa tambahan gaji agar mereka tidak lagi mempunyai kecemburuan sosial dengan guru-guru pada umumnya, c) memberikan perhatian lebih kepada anak-anak binaan atau siswa, d) menambah jam pelajaran atau jam sekolah, e) inovasi metode-metode baru yang lebih menarik dalam pembelajaran pendidikan budi pekerti, dan f) menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan penuh dengan nilai budi pekerti.

Dengan adanya beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di LPA tersebut, diharapkan proses pendidikan budi pekerti di LPA Blitar bisa berjalan dengan baik. Selain itu, diharapkan juga bahwa setelah keluar dari LPA Blitar nantinya anak-anak tersebut bisa menjadi anak yang berakhlak baik, berbudi pekerti dan yang paling penting tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan tercela yang sudah pernah dilakukan.

SIMPULAN

Tujuan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar adalah untuk mengubah perilaku anak binaan yang semula tidak baik menjadi berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga jika keluar dari LPA Blitar mereka dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan dapat hidup secara wajar seperti anak-anak pada umumnya.

Isi materi Pendidikan Budi Pekerti yang diajarkan di LPA Blitar adalah saling menghormati antar sesama, bertanggungjawab dan disiplin, menjalankan ibadah sesuai agamanya, diajarkan mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, sopan santun, patriotis, empati, adil, dan kebersamaan. Mengenai metode yang dilaksanakan dalam pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar ialah metode ceramah, permainan, diskusi dan pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan antara lain; berdoa sebelum memulai kegiatan, berjabat tangan saat bertemu dengan guru pengajar, saling menghormati, berperilaku sopan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan evaluasi pengajaran Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar dilaksanakan dengan cara memberikan test atau ujian tulis dan melalui evaluasi diri.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar antara lain: motivasi belajar siswa rendah, kurangnya koordinasi dan pengertian dari masing-masing sub bidang di Lapas, jumlah tenaga pengajar yang terbatas, guru pengajar kurang kompeten, motivasi guru dalam mengajar kurang, dan minimnya jam pelajaran. Untuk itu diterapkan beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar antara lain: menyediakan tambahan tenaga guru, bisa dari LPA dan dari luar yang memang mempunyai kompetensi mengajar, guru-guru yang masih mempunyai SK dari Depdiknas diberikan tambahan gaji agar mereka tidak lagi mempunyai kecemburuan sosial dengan guru-guru pada umumnya, memberikan perhatian lebih kepada anak-anak binaan atau siswa, menambah jam pelajaran atau jam sekolah, inovasi metode pembelajaran agar lebih menarik dalam pembelajaran pendidikan budi pekerti, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan penuh dengan nilai budi pekerti.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, maka perlu meningkatkan motivasi guru pengajar dalam pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar, misalnya dengan memberikan fasilitas pendukung proses pembelajaran dan tambahan insentif agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara guru di LPA dengan guru pada umumnya. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembudayaan budi pekerti juga sangat diperlukan, misalnya mengembangkan sikap sopan santun kepada anak binaan LPA Blitar.

Sosialisasi oleh LPA Blitar kepada masyarakat mengenai penerapan Pendidikan Budi Pekerti di LPA Blitar sekiranya juga perlu dilakukan. Sehingga warga masyarakat bisa mengetahui bahwa selain keamanan dan kedisiplinan, anak-anak binaan lapas juga diberikan pendidikan, baik formal maupun non formal, seperti Pendidikan Budi Pekerti. Sehingga ketika keluar dari LPA, maka nantinya anak-anak ini bisa diterima kembali oleh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas, 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Pedoman Tatakrama dan Tatatertib*, Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (DEKDISMEN). 2004. *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Depdiknas
- Kusumah, Yaya. 2007. *Telaah Budi Pekerti dalam Pembelajaran di Sekolah (Implementasi Konsep dan Prinsip Tatakrama dalam Kehidupan Berbasis Akademis)*, (Online), (www.Kusumah.org.id), diakses tanggal 10 Februari 2011
- Muspita, Novi Catur. 2005. *Profil Penyelenggaraan Keterampilan Untuk Pembinaan Anak Didik di LPA Blitar*. Universitas Negeri Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIP UM
- Prantiasih, Arbaiyah. 2010. *Pengembangan Model Pembelajaran Melalui Pendekatan Inculcation dalam Melaksanakan Pembelajaran Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Se Malang Raya*. Malang: Lemlit UM
- Rochmadi, Nur Wahyu. 2002. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Malang: Wineka Media.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutja, Akmal. 2007. *Panduan Penerapan Strategi Bedah Nilai Bagi Guru Pendidikan Budi Pekerti*. Jambi: Jambi Media
- Sutja, Akmal. 2007. *Panduan Penerapan Strategi Bedah Nilai Bagi Guru Pendidikan Budi Pekerti*. Jambi: Jambi Media
- Undang-Undang Dasar 1945. Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainab, Siti. 2001. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasaryakatan Anak Blitar*. Universitas Negeri Malang. Skripsi tidak diterbitkan
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara